

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini digunakan dua penelitian terdahulu sebagai bahan acuan. Pertama adalah penelitian yang dilakukan Yessy Chiristina Dewi pada tahun 2011 berjudul “ Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas Terhadap Pasar, Efisiensi Dan Sovabilitas Terhadap ROA Pada Bank Pemerintah”. Variabel-variabel bebas yang digunakan adalah CR, LDR, LAR, APB,NPL, PPAP, IRR, PDN, BOPO, AUR, FACR sedangkan variabel tergantungnya adalah ROA.

Teknik *sampling* pada penelitian terdahulu menggunakan teknik *sensus*. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah metode dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa laporan keuangan. Untuk teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian terdahulu adalah :

1. Variabel CR, LDR, LAR, APB, NPL, PPAP, IRR, PDN, BOPO, AUR dan FACR secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Pemerintah selama periode triwulan I tahun 2006 sampai triwulan IV tahun 2009.
2. Variabel CR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Pemerintah selama periode triwulan I tahun 2006 sampai triwulan IV tahun 2009.

3. Variabel LDR secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Pemerintah selama periode triwulan I tahun 2006 sampai triwulan IV tahun 2009.
4. Variabel LAR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Pemerintah selama periode triwulan I tahun 2006 sampai triwulan IV tahun 2009.
5. Variabel APB secara parsial mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Pemerintah selama periode triwulan I tahun 2006 sampai triwulan IV tahun 2009.
6. Variabel NPL secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Pemerintah selama periode triwulan I tahun 2006 sampai triwulan IV tahun 2009.
7. Variabel PPAP secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Pemerintah selama periode triwulan I tahun 2006 sampai triwulan IV tahun 2009.
8. Variabel IRR secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Pemerintah selama periode triwulan I tahun 2006 sampai triwulan IV tahun 2009.
9. Variabel PDN secara parsial mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Pemerintah selama periode triwulan I tahun 2006 sampai triwulan IV tahun 2009.
10. Variabel BOPO secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Pemerintah selama periode triwulan I

tahun 2006 sampai triwulan IV tahun 2009.

11. Variabel AUR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Pemerintah selama periode triwulan I tahun 2006 sampai triwulan IV tahun 2009.
12. Variabel FACR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Pemerintah selama periode triwulan I tahun 2006 sampai triwulan IV tahun 2009.
13. Dari kesebelas variabel bebas CR, LDR, LAR, APB, NPL, PPAP, IRR, PDN, BOPO, AUR dan FACR yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap ROA adalah BOPO, karena mempunyai nilai koefisien determinasi parsial tertinggi sebesar 88,17 persen bila dibandingkan dengan koefisien determinasi parsial pada variabel bebas lainnya.

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Ema Rachmawati pada tahun 2013 berjudul “ Pengaruh LDR, LAR, NPL, IRR, BOPO, FACR dan PR terhadap ROA (*Return On Asset*) pada Bank Pembangunan Daerah”. Variabel-variabel bebas yang digunakan adalah LDR, LAR, NPL, IRR, BOPO, FACR dan PR sedangkan variabel tergantungnya adalah ROA.

Teknik *sampling* pada penelitian terdahulu menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah metode dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa laporan keuangan. Untuk teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian terdahulu adalah :

1. Rasio LDR, LAR, NPL, IRR, BOPO, FACR dan PR secara simultan

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah.

2. LDR secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah periode Triwulan I tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV tahun 2012.
3. LAR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah periode Triwulan I tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV tahun 2012.
4. NPL secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah periode Triwulan I tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV tahun 2012.
5. APB secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah periode Triwulan I tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV tahun 2012.
6. IRR secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah periode Triwulan I tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV tahun 2012.
7. BOPO secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah periode Triwulan I tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV tahun 2012.
8. FACR secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah periode Triwulan I tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV tahun 2012.

9. Pr secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Pembangunan Daerah periode Triwulan I tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV tahun 2012.
10. Dari tujuh variabel bebas LDR, LAR, NPL, IRR, BOPO, FACR dan PR yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap ROA adalah BOPO, karena mempunyai nilai koefisien determinasi parsial tertinggi sebesar 33,40 persen bila dibandingkan dengan koefisien determinasi parsial pada variabel bebas lainnya.

Tabel 2.1
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN TERDAHULU
DENGAN PENELITIAN SAAT INI

Keterangan	Yessy Christina Dewi (2011)	Ema Rachmawati (2013)	Penelitian Sekarang
Judul	Pengaruh Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas Terhadap Pasar, Efisiensi Dan Sovabilitas Terhadap ROA Pada Bank Pemerintah	Pengaruh LDR, LAR, NPL, IRR, BOPO, FACR dan PR terhadap ROA (<i>Return On Asset</i>) pada Bank Pembangunan Daerah	Pengaruh Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva, Efisiensi Dan Jumlah Ksm Terhadap Roa Pada Upk Pnpm Mandiri Di Kabupaten Sidoarjo
Variabel Bebas	CR, LDR, LAR, APB, NPL, PPAP, IRR, PDN, BOPO, AUR dan FACR	LDR, LAR, NPL, IRR, BOPO, FACR dan PR	LAR, NPL, BOPO, CCr dan Jumlah KSM
Periode penelitian	triwulan I tahun 2006 sampai triwulan IV tahun 2009	Triwulan I tahun 2009 sampai dengan Triwulan IV tahun 2012	November tahun 2012 sampai dengan Oktober 2013
Populasi	Bank Pemerintah	Bank Pembangunan Daerah	PNPM Mandiri Perkotaan di kabupaten Sidoarjo
Teknik sampling	Sensus	Purposive Sampling	Sensus
Teknik Pengambilan Data	Sekunder	Sekunder	Sekunder
Metode Pengumpulan Data	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi

Sumber : Yessy Christina Dewi (2011) & Ema Rachmawati (2013)

2.2 Landasan Teori

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam

penelitian adalah sebagai berikut :

2.2.1 Lembaga Keuangan Mikro

Salah satu wadah dalam mengatasi kemiskinan ini adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berkembang sebagai alat pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (Lincolin Arsyad:3) menegaskan bahwa tujuan dari LKM ini adalah untuk melayani kebutuhan financial dari pasar yang tidak melayani atau yang tidak dilayani dengan baik sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan seperti menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, membantu usaha-usaha yang telah ada untuk perempuan atau sekelompok masyarakat lainnya yang kurang beruntung (masyarakat miskin atau orang-orang yang berpenghasilan rendah), dan mendorong pengembangan usaha baru.

Definisi LKM yang diajukan oleh beberapa pakar dan organisasi nampak saling berbeda satu sama lain walau pada dasarnya definisi-definisi tersebut memiliki inti yang sama, yaitu merujuk keuang mikro sebagai upaya penyediaan jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit, dan juga jasa keuangan lain yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial (Lincolin Arsyad:23). Dalam pelaksanaannya, selain perantara keuangan, beberapa LKM juga menyediakan jasa perantara sosial seperti pembentukan kelompok, pengembangan kepercayaan diri, dan pelatihan pengetahuan keuangan dan kemampuan manajemen untuk anggota sebuah kelompok yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perempuan dan laki-laki berpenghasilan rendah. Salah satu alasannya adalah

karena orang-orang berpenghasilan rendah harus berjuang menghadapi hambatan yang berat (seperti buta huruf, diskriminasi gender dan keterpencilan) dalam usahanya untuk memperoleh akses terhadap lembaga jasa keuangan konvensional. Hal ini berarti bahwa selain memberikan akses kepada orang-orang berpenghasilan rendah terhadap pengadaan pinjaman, keterampilan dan kepercayaan diri mereka juga harus ditingkatkan. Oleh karena itu pendekatan keuangan mikro bukanlah pendekatan minimalis yang hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan saja akan tetapi merupakan pendekatan terpadu yang juga menawarkan jasa-jasa lain yang telah disebutkan diatas. Pendekatan tersebut diharapkan juga dapat mengurangi kemiskinan dan mengembangkan dan memperkuat kapasitas institusional system keuangan local dengan menemukan cara yang terbaik untuk dapat meminjamkan uang kepada keluarga miskin dengan biaya minimum.

Karakteristik LKM menekankan bahwa pada umumnya merupakan sebuah kesatuan dari tata-kelola yang dinamis, inovatif, dan lentur yang dibuat sesuai kondisi lingkungan social dan ekonomi lokal. Menurut Lincoln Arsyad:26 terdapat empat karakteristik yang membedakan LKM dengan Bank Komersial. *Pertama*, LKM memiliki informasi yang lebih baik tentang para nasabahnya disbanding bank-bank komersial. Pemberi pinjaman memiliki informasi yang mencukupi tentang peminjam yang diperoleh dari hubungan dengan lingkungan sekitar dan komunitas atau dari transaksi-transaksi kredit sebelumnya. Hal tersebut dapat mengurangi biaya informasi mereka disbanding biaya yang harus dikeluarkan bank komersial. *Kedua*, biaya administrasi yang harus dikeluarkan

oleh LKM lebih rendah daripada bank-bank komersial karena pegawai LKM dibayar relative lebih rendah (kerena kurang terdidik), skala usaha yang tidak besar, dan pekerjaan administrasi yang lebih sederhana disbanding bank komersial. *Ketiga*, tingkat bunga LKM tidak diatur secara khusus yang karenanya dapat disesuaikan dengan kehendak pasar. Akibatnya, kompetisi non-harga dapat ditekan hingga tingkat yang optimal. *Keempat*, LKM tidak memiliki kewajiban pencadangan modal seperti yang diterapkan pada bank komersil modern.

Pengukuran Kerja LKM (Lincolin:56), harus didasarkan pada tujuan LKM. Meskipun tujuan utama kebanyakan LKM adalah meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin. Dalam hal ini terdapat dua kriteria pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. *Kriteria pertama*, adalah kemandirian yang dapat dicapai apabila tingkat kembalian ekuitas, jumlah bersih subsidi yang diterima, sama dengan atau melebihi biaya oportunitas dan ekuitas. *Kriteria kedua*, adalah jumlah klien yang dilayani dan ragam jasa keuangan yang diberikan.

2.2.3. Kinerja Keuangan PNPM Mandiri

Kinerja merupakan hal terpenting yang harus di capai oleh setiap perusahaan demikain juga hal ini berlaku pada lembaga keuangan mikro (UPK), seperti PNPM Mandiri, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelolah dan mengalokasikan sumber dayanya.

Prinsip PNPM-Perdesaan terdiri dari Prinsip-Prinsip PPK ditambah dengan beberapa prinsip lain yang merupakan penekanan terhadap prinsip-prinsip yang telah ada dan dilakukan sebelumnya dalam PPK atau PNPM-PPK

(http://www.pnpm-perdesaan.or.id/?page=halaman&story_id=21) yakni:

Bertumpu pada Pembangunan Manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.

Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.

Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.

Berorientasi pada Masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan, harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.

Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.

Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-

gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.

Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.

Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

PPK/PNPMPerdesaan(http://www.pnpmperdesaan.or.id/?page=halaman&story_id=27) memiliki kesamaan tujuan, yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai tahapan kegiatan dalam sebuah siklus kegiatan. Tahap-tahapan tersebut adalah:

Diseminasi Informasi dan Sosialisasi. Tahapan ini dilakukan dalam beberapa cara: lokakarya di berbagai level pemerintahan, *hearing* anggota legislatif di berbagai jenjang, dan forum-forum musyawarah masyarakat. Setiap desa dilengkapi Papan Informasi sebagai salah satu media (penyebaran) informasi. Membuka kerjasama dengan berbagai pihak (media massa, NGO, akademisi, anggota dewan).

Proses Perencanaan Partisipatif. Dilaksanakan mulai dari tingkat dusun, desa dan kecamatan. Masyarakat memilih Fasilitator Desa (FD) untuk

mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. FD mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk membahas kebutuhan dan prioritas usulan desa. Dengan difasilitasi FD, masyarakat desa bermusyawarah menentukan jenis kegiatan yang akan diusulkan mewakili desa. Program menyediakan tenaga konsultan sosial dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk membantu sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Seleksi Proyek di Tingkat Desa dan Kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan antardesa (kecamatan) untuk memutuskan usulan prioritas dan layak didanai. Musyawarah terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan. Forum antardesa terdiri dari wakil-wakil dari desa. Pilihan proyek adalah *open menu* untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan.

Masyarakat Melaksanakan Proyek. Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya untuk menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa-desa yang terdanai. Fasilitator Teknis program akan mendampingi TPK dalam mendisain prasarana, penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja umumnya berasal dari desa penerima manfaat.

Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan. Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan dua kali dalam pertemuan terbuka di desa, yakni sebelum proyek mencairkan dana tahap berikutnya. Pada pertemuan akhir, TPK akan melakukan serah terima proyek kepada masyarakat, desa, dan Tim Pemelihara kegiatan.

2.2.4. Cara kerja PNPM Mandiri

- a) Diseminasi Informasi dan Sosialisasi. Tahapan ini dilakukan dalam beberapa cara: lokakarya di berbagai level pemerintahan, *hearing* anggota legislatif di berbagai jenjang, dan forum-forum musyawarah masyarakat. Setiap desa dilengkapi Papan Informasi sebagai salah satu media (penyebaran) informasi. Membuka kerjasama dengan berbagai pihak (media massa, NGO, akademis, anggota dewan).
- b) Proses Perencanaan Partisipatif. Dilaksanakan mulai dari tingkat dusun, desa dan kecamatan. Masyarakat memilih Fasilitator Desa (FD) untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. FD mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk membahas kebutuhan dan prioritas usulan desa. Dengan difasilitasi FD, masyarakat desa bermusyawarah menentukan jenis kegiatan yang akan diusulkan mewakili desa. Program menyediakan tenaga konsultan sosial dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk membantu sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- c) Seleksi Proyek di Tingkat Desa dan Kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan antar desa (kecamatan) untuk memutuskan usulan prioritas dan layak didanai. Musyawarah terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan. Forum antar desa terdiri dari wakil-wakil dari desa. Pilihan proyek adalah *open menu* untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan.
- d) Masyarakat melaksanakan proyek. Dalam forum musyawarah, masyarakat

memilih anggotanya untuk menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa-desa yang terdani. Fasilitator Teknis program akan mendampingi TPK dalam mendisain prasarana, penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja umumnya berasal dari desa penerima manfaat.

- e) Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan. Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan dua kali dalam pertemuan terbuka di desa, yakni sebelum proyek mencairkan dana tahap berikutnya. Pada pertemuan akhir, TPK akan melakukan serah terima proyek kepada masyarakat, desa, dan Tim Pemelihara kegiatan.

Berikut macam-macam analisis yang digunakan :

1. Analisis Rasio Likuiditas

Menurut kasmir (2010:286) likuiditas adalah faktor penting untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya / kewajiban pada saat ditagih, hal ini juga berlaku pada lembaga keuangan mikro (UPK). Menurut Kasmir (2010 : 286-290) Adapun rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas bank adalah sebagai berikut :

1. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan . LDR yang tinggi merupakan satu tanda peringatan kepada mereka, agar lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan pemberian kredit.

Rumus yang digunakan :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

2. *Cash Ratio (CR)*

CR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut. Rumus yang dapat digunakan adalah:

$$\text{CR} = \frac{\text{Alat - alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

3. *Loan To Asset Ratio (LAR)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki oleh bank. Semakin tinggi tingkat rasio semakin rendahnya tingkat likuiditas bank. Rasio ini memberikan informasi porsi dana yang dialokasikan dalam bentuk kredit dari total asset bank. Kenaikan rasio ini akan menunjukkan rendahnya likuiditas bank. Rumus yang dapat digunakan adalah :

$$\text{LAR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

4. *Investing Policy Ratio (IPR)*

IPR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimiliki. IPR ini merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh bank untuk meningkatkan pendapatan melalui surat-surat berharga yang dimiliki yang terdiri dari sertifikat BI dan surat-surat berharga lainnya Rumus IPR yang dapat digunakan adalah :

$$\text{IPR} = \frac{\text{Surat Berharga Yang Dimiliki Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots\dots\dots (4)$$

5. *Quick Ratio*

Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan, dan deposit) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank. Rumus yang dapat digunakan untuk mencari *Quick Ratio* sebagai berikut :

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Cash Assets}}{\text{Total deposit}} \times 100\% \dots\dots\dots (5)$$

6. *Banking Ratio*

Banking ratio bertujuan mengukur tingkat likuiditas dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditas bank semakin rendah, karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil, demikian pula sebaliknya.

Rumus untuk mencari *Banking Ratio* sebagai berikut :

$$\text{Banking Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total deposits}} \times 100\% \dots\dots\dots (6)$$

Pendapat Kasmir yang mengulas tentang Rasio Likuiditas juga didukung oleh Modul Khusus Pinjaman Bergulir (2012:37) yang juga mengulas tentang Rasio Likuiditas diantaranya yaitu :

a. *Loan At Risk (LAR)*

LAR merupakan indikator yang menunjukkan berapa persen peminjam yang menunggak, Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara berapa KSM peminjam yang menunggak lebih dari tiga bulan dengan seluruh KSM peminjam yang masih memiliki saldo pinjaman. *Loan at risk*

(LAR) dapat dirumuskan dengan:

$$LAR = \frac{\text{Jumlah ksm menunggak} \geq 3\text{bulan yang diberikan}}{\text{jumlah ksm peminjam}} \times 100\% \dots\dots\dots(7)$$

Pada penelitian ini rasio yang digunakan dalam melakukan Likuiditas PNPM Mandiri adalah *Loan At Risk* (LAR)

2. Kualitas Aktiva

Menurut Veithzal Rivai (2013 : 473), Rasio kualitas aktiva ini merupakan aset untuk memastikan kualitas aset yang dimiliki bank dan nilai riil dari aset tersebut. Kemerosotan kualitas dan nilai aset aset merupakan sumber erosi terbesar bagi bank. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen resiko kredit.

Menurut Viethzhal Rivai (2013 : 473 – 474) rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas aktiva suatu bank adalah sebagai berikut :

1. *Bad Debt Ratio* (BDR)

Aktiva produktif yang diklasifikasikan ialah semua aktiva yang dimiliki oleh bank yang karena suatu sebab terjadi gangguan usaha debitur mengalami kesulitan dalam cash flow yang dapat mengakibatkan kesulitan membayar bunga dan bahkan angguran utang pokoknya. Rumus yang dapat digunakan adalah :

$$BDR = \frac{\text{Aktiva Produktif Bermasalah}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\% \dots\dots\dots (8)$$

2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Kualitas aktiva produktif adalah perbandingan antara classified asset (kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet) dengan total Earning assets (kredit yang diberikan, surat berharga, aktiva antar bank dan penyertaan). Rumus

yang dapat digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{PPAP} = \frac{\text{PPAP Dibentuk}}{\text{PPAP Wajib}} \times 100\% \dots\dots\dots (9)$$

Pendapat Veitzhal Rivai yang mengulas tentang Rasio kualitas aktiva juga didukung oleh pendapat Taswan (2010: 164-165) yang juga mengulas tentang Rasio kualitas aktiva diantaranya yaitu :

3. *Aktiva Produktif Bermasalah (APB)*

rasio *Aktiva Produktif Bermasalah* merupakan aktiva produktif bermasalah terhadap total aktiva produktif mengindikasikan bahwa semakin besar rasio ini semakin buruk kualitas aktiva produktifnya, sebaliknya semakin kecil semakin baik kualitas aset produktifnya. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{APB} = \frac{\text{Aktiva Produktif Bermasalah}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\% \dots\dots\dots (10)$$

Dimana :

- a. Aktiva produktif bermasalah terdiri dari : jumlah Aktiva Produktif pihak terkait maupun tidak terkait terdiri dari Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M) yang terdapat dalam kualitas aktiva produktif.
- b. Aktiva Produktif terdiri dari : Jumlah seluruh Aktiva Produktif pihak terkait maupun tidak terkait maupun tidak terkait yang terdiri dari Lancar (L), Dalam Pengawasan Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), dan Macet (M) yang terdapat dalam kualitas Aktiva produktif.

4. *Non Performing Loan (NPL)*

Non Performing Loan adalah rasio yang menunjukkan kemampuan UPK dalam mengelolah kredit yang ada dari kredit bermasalah yang diberikan oleh

UPK. Kredit yang dimaksud adalah kredit yang diberikan kepada kelompok KSM bukan kredit yang lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin besar rasio NPL maka semakin menunjukkan kredit tersebut bermasalah. Dalam PNPM mandiri Non Performing Loan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Non Performing Loan} = 100\% (\text{Total Pinjaman}) - \text{RR (Repayment Rate)} \dots\dots(11)$$

Keterangan : RR (Repayment Rate) atau tingkat pengembalian pinjaman ini dapat dihitung dari Pinjaman berjalan dibagi dengan total pinjaman berjalan dikali seratus persen

5. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Rasio *Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif* (PPAP) merupakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap total aktiva produktif mengindikasikan bahwa semakin besar rasio ini menunjukkan semakin menurun kualitas aktiva produktif. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{PPAP} = \frac{\text{PPAP Yang Telah Dibentuk}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\% \dots\dots\dots (12)$$

6. Pemenuhan PPAP

Rasio PPAP Dibentuk terhadap PPA Wajib Dibentuk merupakan rasio yang mengukur kepatuhan bank dalam membentuk PPAP dan mengukur kualitas aktiva produktif. Semakin tinggi rasio ini bank semakin mematuhi ketentuan pembentukan PPAP.

Pemenuhan PPAP =

$$\frac{\text{PPAP Dibentuk}}{\text{PPAP yang Wajib Dibentuk}} \times 100\% \dots\dots\dots (13)$$

Pada penelitian ini rasio yang digunakan dalam melakukan kualitas aktiva PNPM Mandiri adalah *Non Performing Loan* (NPL)

3. Rasio Efisiensi

Menurut Veithzal Rivai (2007:822), Rasio efisiensi adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidaknya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Dalam pengertian ini juga dapat berlaku pada kinerja UPK PNPM Mandiri. Biaya operasional pada UPK PNPM Mandiri adalah seluruh biaya yang dikeluarkan yang berkaitan dengan kegiatan operasional UPK yang terdiri dari biaya intensif petugas UPK, biaya Adm kantor, biaya adm dan transportasi, biaya rapat, biaya cadangan resiko pinjaman, dan biaya penyusutan inventaris.

Pengukuran efisiensi bank dapat dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio berikut ini :

1. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio ini digunakan untuk mengukur biaya operasional yang dikeluarkan UPK dalam mendapatkan pendapatan (laba). Menurut Lukman Dendawijaya (2009:119), BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan UPK dalam menjalankan operasionalnya. Besarnya rasio BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total biaya operasional}}{\text{Total pendapatan operasional}} \times 100\% \dots\dots\dots(14)$$

1. *Fee Base Income Ratio* (FBIR)

Menurut Veitzhal Rivai (2013 : 482) *Fee Base Income Ratio* (FBIR) adalah pendapatan operasional diluar bunga.

Adapun keuntungan yang di dapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa lainnya :

- a. Biaya administrasi : biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi tertentu. Pembebanan biaya administrasi biasanya dikenakan untuk pengelolaan sesuatu fasilitas tertentu.
- b. Biaya kirim : biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang (transfer), baik jasa transfer dalam negeri maupun luar negeri.
- c. Biaya tagih : biaya tagih merupakan jasa yang dikenakan untuk menagikan dokumen-dokumen milik nasabahnya, seperti jasa kliring dan jasa inkaso.
- d. Biaya provisi dan komisi : biaya provisi dan komisi biasanya dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Besarnya provisi dan komisi tergantung dari jasa yang diberikan serta status nasabah yang bersangkutan.
- e. Biaya sewa : biaya sewa dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa save deposit box. Besarnya biaya sewa tergantung ukuran box dan jangka waktu yang digunakannya.
- f. Biaya iuran : biaya iuran diperoleh dari jasa pelayanan bank card atau kartu kredit, dimana kepada setiap pemegang kartu kredit dikenakan biaya iuran. Biasanya biaya iuran ini dikenakan pertahun.

Semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi pula pendapatan operasional diluar bunga. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{FBIR} = \frac{\text{Pendapatan Operasional di luar pendapatan bunga}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots\dots\dots (15)$$

Pendapat Veithzal Rivai yang mengulas tentang Rasio Efisiensi juga didukung oleh Modul Khusus Pinjaman Bergulir (2012:37) yang juga mengulas tentang Rasio Efisiensi diantaranya yaitu :

a. Cost Coverage Ratio (CCR)

Menurut modul khusus pinjaman bergulir menjelaskan bahwa *Cost Coverage Ratio* (CCR) adalah kemampuan UPK untuk menutup biaya dari pendapatan yang diperolehnya. Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara seluruh pendapatan yang diperoleh UPK dengan seluruh biaya yang dikeluarkan UPK. *CCR* mengukur berapa besar rasio pendapatan dibandingkan biaya. Berapa pendapatan yang meng-cover biaya. Dikatakan berkinerja baik apabila lebih besar dari 125%, artinya bila UPK BKM berani untuk mengeluarkan biaya Rp 100, maka UPK BKM harus dapat memperoleh pendapatan minimal Rp 125. (<http://www.p2kp.org/wartaarsipdetil.asp?mid=3136&catid=2&>) Rumus dari CCR adalah sebagai berikut:

$$\text{CCR} = \frac{\text{Total Pendapatan UPK}}{\text{Total Biaya UPK}} \times 100\% \dots\dots\dots (16)$$

Pada penelitian ini rasio yang digunakan dalam melakukan efisiensi PNPM Mandiri adalah *Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO) dan *Cost Coverage Ratio* (CCR)

4. Jumlah Anggota KSM

Dalam modul PNPM Mandiri khususnya pinjaman bergulir menjelaskan bahwa jumlah anggota KSM atau disebut juga dengan jumlah

masyarakat miskin merupakan jumlah anggota KSM yang mendapatkan pinjaman dana bergulir. Ketentuan dalam Modul Khusus Pinjaman Bergulir, indikator jumlah KSM ini adalah 100% untuk katagori memuaskan dan 70% untuk katagori minimum.

5. Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2010 : 279), Rasio Rentabilitas atau sering disebut dengan rasioprofitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank bersangkutan.

Menurut Kasmir (2010 : 279-299), Rasio umum yang digunakan dalam melakukan analisis profitabilitas adalah sebagai berikut :

1. *Net Interest Margin (NIM)*

NIM merupakan kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi secara overal. Rumus yang dapat digunakan untuk mengukur rasio ini adalah :

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

2. *Return On Asset (ROA)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan, sedangkan ROA adalah perbandingan antara jumlah keuntungan (laba bersih) yang diperoleh bank selama masa tertentu dengan mengukur jumlah harga (*total asset*) yang mereka miliki Untuk mengukur rasio ROA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

3. *Return On Equity (ROE)*

ROE merupakan rasio yang untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang ada untuk mendapat income. Rasio ini penting bagi para pemegang saham karena rasio ini dapat menggambarkan seberapa besar bank telah mampu menghasilkan keuntungan dari jumlah dana yang telah diinvestasikan. Rumus yang dapat digunakan untuk mencari besarnya *rasio Return on Equity* ini adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Rata-rata Modal inti}} \times 100\%$$

4. *Net Profit Margin (NPM)*

NPM merupakan rasio yang digunakan untuk kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasinya. Rumus yang dapat digunakan adalah :

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

5. *Gross Profit Margin (GPM)*

Rasio ini digunakan untuk mengetahui persentasi laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya. Rumus yang dapat digunakan untuk mengukur rasio ini adalah :

$$\text{GPM} = \frac{\text{Pendapatan Operasi} - \text{Biaya Operasi}}{\text{Biaya Operasi}} \times 100\%$$

1.2.4. Pengaruh antar variabel

Pada hubungan variabel ini akan dijelaskan mengenai hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Dimana akan dijelaskan mengenai pengaruh variabel LAR, NPL, BOPO, CCR dan Jumlah KSM dengan ROA.

1. Pengaruh LAR terhadap ROA

LAR memiliki pengaruh negatif terhadap ROA, hal ini terjadi apabila LAR meningkat berarti telah terjadi peningkatan jumlah KSM yang menunggak dengan prosentase peningkatan jumlah KSM yang menunggak lebih dari tiga bulan lebih besar dari pada prosentase peningkatan jumlah KSM peminjam. Akibatnya pendapatan yang diperoleh PNPM Mandiri menurun, sehingga laba menurun dan ROA juga menurun.

2. Pengaruh NPL terhadap ROA

NPL memiliki pengaruh negative terhadap ROA. Hal ini terjadi apabila NPL meningkat, berarti telah terjadi peningkatan kredit bermasalah dengan prosentase peningkatan kredit bermasalah lebih besar dari pada prosentase peningkatan total kredit. Akibatnya terjadi peningkatan biaya pencadangan kredit yang lebih besar dari pada peningkatan pendapatan bunga yang diterima oleh UPK. Sehingga laba UPK menurun dan akhirnya ROA pada UPK menurun.

3. Pengaruh BOPO terhadap ROA

BOPO memiliki pengaruh yang negatif terhadap ROA, hal ini terjadi apabila BOPO meningkat berarti telah terjadi peningkatan biaya operasional dengan prosentase peningkatan biaya operasional lebih besar dibandingkan dengan prosentase peningkatan atas pendapatan operasional, akibatnya tingkat

efisiensi PNPM Mandiri dalam menekan biaya operasional dalam memperoleh pendapatan operasional menurun, sehingga laba menurun dan ROA juga menurun.

4. Pengaruh CCR terhadap ROA

CCR memiliki pengaruh positif terhadap ROA, hal ini terjadi apabila CCR meningkat berarti telah terjadi peningkatan seluruh pendapatan yang diperoleh UPK dengan prosentase peningkatan seluruh pendapatan yang diperoleh UPK lebih besar dibandingkan dengan prosentase peningkatan seluruh biaya yang dikeluarkan UPK. Akibatnya tingkat efisiensi PNPM Mandiri dalam memperoleh seluruh pendapatan UPK meningkat, sehingga laba meningkat dan ROA juga meningkat.

5. Pengaruh Jumlah KSM dengan ROA

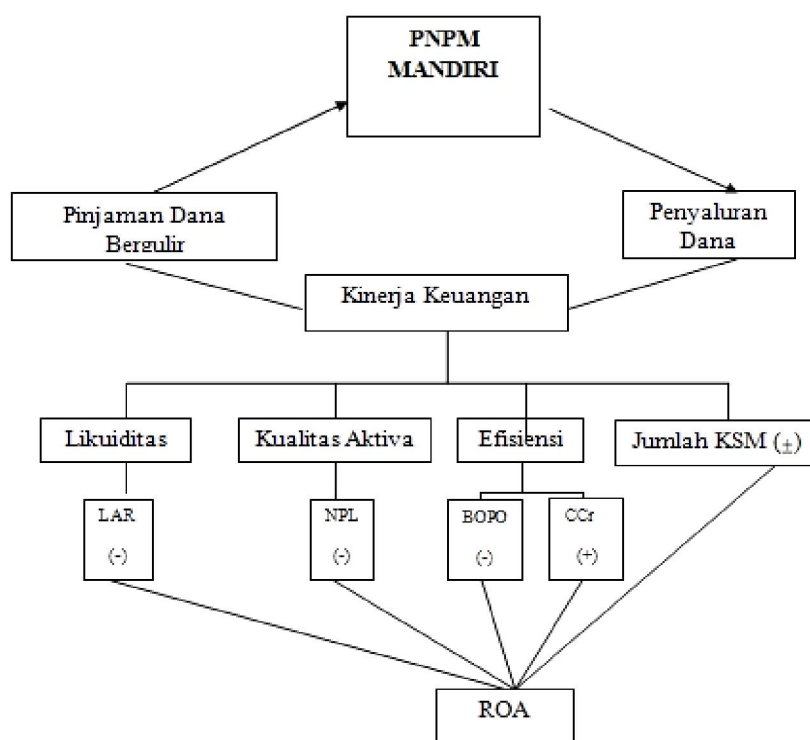
Jumlah KSM memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap ROA.

Dikatakan pengaruh positif apabila Jumlah KSM meningkat dan peningkatannya diiringi dengan Jumlah KSM produktif atau kredit yang diberikan lancar. Akibatnya akan menimbulkan peningkatan pendapatan lebih besar dari pada peningkatan pencadangan biaya sehingga laba meningkat dan ROA juga akan meningkat. Dengan demikian pengaruh antara Jumlah KSM dengan ROA adalah Positif.

Dikatakan pengaruh negatif apabila peningkatan Jumlah KSM meningkat dan peningkatannya tidak diiringi dengan Jumlah KSM yang produktif atau kredit yang diberikan PNPM Mandiri adalah kredit macet atau tidak terbayar. Akibatnya akan menimbulkan penurunan pendapatan lebih

besar dari pada penurunan pencadangan biaya sehingga laba menurun dan ROA juga akan menurun. Dengan demikian pengaruh Jumlah KSM dengan ROA adalah negatif.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Dapat di jelaskan atau di simpulkan dari gambar kerangka pemikiran di atas bahwa kinerja UPK pada PNPB Mandiri yang di ukur dari laporan-laporan keuangan terdiri dari likuiditas yaitu; LAR, Kualitas aktiva; NPL, Efisiensi; BOPO dan CCR dan Jumlah KSM akan berpengaruh pada ROA.

2.4 Hipotesis Penelitian

Bedasarkan Perumusan masalah sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis ingin menguji kebenaran dari hipotesis yaitu :

1. Apakah Rasio LAR, NPL, BOPO, CCR dan jumlah KSM secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada PNPM Mandiri di Kabupaten Sidoarjo.
2. LAR secara partial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada PNPM Mandiri di Kabupaten Sidoarjo.
3. NPL secara partial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada PNPM Mandiri di Kabupaten Sidoarjo.
4. BOPO secara partial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada PNPM Mandiri di Kabupaten Sidoarjo.
5. CCR secara partial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada PNPM Mandiri di Kabupaten Sidoarjo.
6. Jumlah KSM secara parsial berpengaruh terhadap ROA Pada PNPM Mandiri di Kabupaten Sidoarjo.